



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI RIAU



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa



2023

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN TINGGI RIAU

PENGADILAN TINGGI RIAU
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.315 PEKANBARU – RIAU 28131
TELP. (0761) 33768 – FAX. 0761 21523

   PENGADILAN TINGGI RIAU  PT-RIAU.GO.ID  +62853-5800-0101



Sekapur Sirih

Dengan berakhirnya tahun 2023 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Tinggi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan ditahun 2023. Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), Pengadilan Tinggi Riau menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Secara keseluruhan, Laporan Kegiatan Tahun 2023 ini berisi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Riau yang selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan diharapkan berujung pada peningkatan pelayanan publik dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga dan aparatur pengadilan di wilayah Riau.

Akhir kata, saya selaku pimpinan mengucapkan terimakasih atas segala dedikasi dan partisipasi aktif, baik pikiran, tenaga, dan materi segenap Hakim dan karyawan karyawan Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang telah mampu memberikan yang terbaik bagi pencari keadilan.

Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Tinggi Riau ditahun berikutnya.

Pekanbaru, 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum

TENTANG PENGADILAN TINGGI RIAU

Pengadilan Tinggi/Tipokor Riau berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No. 315 Pekanbaru - Riau. No. Telp/Fax : (0761) 21523. Pada awalnya Pengadilan Tinggi Riau merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982, Pengadilan Tinggi Riau didirikan di atas lahan seluas 5.000 M2 dengan luas bangunan 3.392 M2 dan diresmikan pada tanggal 21 Juli 1983.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau meliputi propinsi Riau yang saat ini terdiri dari 11 (sebelas) Pengadilan Negeri yaitu :

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 01 | Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA | 09 | Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Kelas II |
| 02 | Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA | 10 | Pengadilan Negeri Rengat Kelas II |
| 03 | Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB | 11 | Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II |
| 04 | Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB | | |
| 05 | Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB | | |
| 06 | Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas IB | | |
| 07 | Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II | | |
| 08 | Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II | | |

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dan telah dilaksanakan Peresmian Operasional 13 Pengadilan Tingkat Banding Baru dan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 5 Desember 2021 maka terdapat 4 (empat) Pengadilan Tingkat Pertama yang tadinya merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Adapun 4 Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah Pengadilan Negeri Batam Kelas IA, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas IA, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II, Pengadilan Negeri Ranai Kelas II. Maka saat ini Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau terdiri dari 11 (sebelas) Pengadilan Negeri.



VISI

"Mewujudkan Pengadilan Tinggi Riau Yang Agung"

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Riau.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Riau.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Riau.

NILAI NILAI UTAMA

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidak berpihakan dan
8. Perlakuan yang sama di depan hukum

PROFIL PIMPINAN



KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

Nama : Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum..

NIP : 19590602 198512 1 001

TTL : Situbondo, 02 Juni 1959

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Pangkat : Pembina Utama (IV/e)

Pendidikan : S3 - Universitas Jayabaya

RIWAYAT JABATAN

No	Tahun	Jabatan
1	2023 - Sekarang	Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Riau
2	2021 - 2023	Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
3	2019 - 2021	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
5	2017 - 2019	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
6	2017 - 2017	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado
7	2015 - 2017	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta
8	2013 - 2015	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
9	2011 - 2013	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
10	2010 - 2011	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar
11	2009 - 2010	Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
12	2008 - 2009	Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Slawi
13	2004 - 2008	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Timur
14	2001 - 2004	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Malang
15	1999 - 2001	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko
16	1995 - 1999	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bangko
17	1990 - 1995	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Polewali
18	1987 - 1990	Staf Pengadilan Negeri Malang
19	1985	CPNS/Cakim Pengadilan Negeri Malang

PROFIL PIMPINAN

PENGADILAN TINGGI RIAU



WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

Nama : Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

NIP : 19600503 198804 1 001

TTL : Rantau Prapat, 03 Mei 1960

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Pangkat : Pembina Utama (IV/e)

Pendidikan : S2 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

RIWAYAT JABATAN

No	Tahun	Jabatan
1	2023 s.d Sekarang	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau
2	2022 - 2023	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
3	2020 - 2022	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
4	2019 - 2020	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
5	2017 - 2018	Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
6	2016 - 2017	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang
7	2014 - 2016	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
8	2009 - 2014	Ketua Pengadilan Negeri Malinau
9	2007 - 2009	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau
10	2006 - 2007	Hakim Pengadilan Negeri Medan
11	1988 - 2006	PNS/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara
12	1988	CPNS/Cakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara

HAKIM TINGGI

PENGADILAN TINGGI RIAU



NELSON SAMOSIR, S.H., M.H.



PETRIYANTI, S.H., M.H.



DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum



INANG KASMAWATI, S.H.



ASWIJON, S.H., M.H.



ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

HAKIM TINGGI

PENGADILAN TINGGI RIAU



H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.



NOER ALI, S.H.



SETIA RINA, S.H., M.H.



Hj. DAHMIWIRDA D., S.H., M.H.



RAMSES PASARIBU, S.H., M.H.



MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H.

HAKIM TINGGI



YUS ENIDAR, S.H., M.H.



Y WISNU WICAKSONO, S.H.



YUZAIDA, S.H., M.H.



JON EFFREDDI, S.H., M.H.



ADMIRAL, S.H., M.H.



Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.

HAKIM TINGGI



SRI ENDANG AMPERAWATI NINGSIH, S.H., M.H.



LILIN HERLINA, S.H., M.H.



Dr. H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

HAKIM TINGGI AD HOC



TANTOWI JAUHARI, S.H., M.H.



Dr. H. BUSRIZALTI, S.H., M.H.



HENDRI, S.H., M.H.

PROFIL PIMPINAN



PANITERA PENGADILAN TINGGI RIAU

Nama : R. SENO SOEHARJONO SANTOSO,
S.H., M.H.
NIP : 19680228 199203 1 002
TTL : Semarang, 28 Februari 1968
Jabatan : Panitera Pengadilan Tinggi Riau
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum STIH IBLAM

RIWAYAT JABATAN

No	Tahun	Jabatan
1	1992 - 1993	CPNS Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
2	1993 - 1999	PNS Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
3	1999 - 2009	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
4	2009 - 2011	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palangkaraya
5	2011 - 2012	Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen
6	2012 - 2016	Panitera / Sekretaris Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan
7	2016 - 2017	Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan
8	2017 - 2019	Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto
9	2019 - 2021	Panitera Pengadilan Negeri Sumber
10	2021	Panitera Pengadilan Negeri Dumai
11	2021 - 2022	Panitera Negeri Batam
12	2022 - 2024	Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya
13	2024 - Sekarang	Panitera Pengadilan Tinggi Riau

PROFIL PIMPINAN



SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI RIAU

Nama : T. YUDIANTO SYAFEI NARIM, S.IP.,
S.H., M.M.
NIP : 19790221 200502 1 001
TTL : Solok Selatan, 21 Februari 1979
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Pendidikan : S2 Magister Management
Universitas Andalas Padang

RIWAYAT JABATAN

No	Tahun	Jabatan
1	2005-2006	Staf Pengadilan Negeri Lubuk Basung
2	2006-2008	Staf Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Basung
3	2008-2010	Staf Urusan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung
4	2010-2015	Kepala Sub. Bagian Keuangan Pengadilan Tinggi Padang
5	Desember 2015 - Agustus 2021	Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Padang
6	Agustus 2021 - Sekarang	Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau



- PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN TINGGI RIAU -



- KELUARGA BESAR PENGADILAN TINGGI RIAU -

PERISTIWA PENTING 2023 PENGADILAN TINGGI RIAU



PELAKSANAAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2022 PENGADILAN TINGGI RIAU

Ketua Pengadilan Tinggi Riau bersama Aparatur Pengadilan Tinggi Riau mengikuti sidang pleno laporan tahunan Pengadilan Tinggi Riau tahun 2022 yang juga dihadiri oleh para stakeholders, akademisi, dan masyarakat umum yang dilaksanakan Tanggal 6 Ferbuari 2023 di Hotel Pangeran Pekanbaru.



PEMBINAAN OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DI PENGADILAN TINGGI RIAU

Ketua Mahkamah Agung melakukan Pembinaan untuk Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau yang dilaksanakan di Ruang Sidang Lt.2 Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 15 Februari 2023



PELAKSANAAN DESK EVALUASI ZI PENGADILAN TINGGI RIAU OLEH BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tim Penilai Internal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan kegiatan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Tinggi Riau yang dilaksanakan secara online/daring pada tanggal 2 Agustus 2023



PENYERAHAN DAN PENGANUGERAHAN PIAGAM PENGHARGAAN UNIT KERJA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

Bertempat di Balaiung Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 2023 dilaksanakan acara Penyerahan dan Penganugerahan Piagam Penghargaan bagi Unit Kerja Berprestasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Pengadilan Tinggi Riau salah satu satuan kerja yang menerima penganugerahan piagam penghargaan unit kerja berpredikat WBK

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2023



PENERIMAAN PENGHARGAAN ROLE MODEL PIMPINAN

Ketua Pengadilan Tinggi Riau Bapak Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum menerima Penghargaan dari Dirjen Badilum atas Role Model Pimpinan Terbaik Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1817/DJU/SK.TI2.1.2/XI/2023 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023 diberikan di Pendopo Wahya Wibawa Graha Pemerintah Kabupaten Jember. tanggal 11 Desember 2023



PERINGKAT I IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Pengadilan Tinggi Riau menerima Penghargaan dari Dirjen Badilum atas Peringkat I Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai 82,90 (A). Penghargaan ini diterima oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau Bapak H. Siswandriyono, S.H., M.H pada tanggal 11 Desember 2023 di Pendopo Wahya Wibawa Graha Pemerintah Kabupaten Jember.



PERINGKAT III ATAS PEMENANG LOMBA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) TAHUN 2023

Pengadilan Tinggi Riau menerima Penghargaan dari Dirjen Badilum Peringkat III atas Pemenang Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2023 dengan kategori terbaik berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1817/DJU/SK.TI2.1.2/XI/2023 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023 diberikan di Pendopo Wahya Wibawa Graha Pemerintah Kabupaten Jember. tanggal 11 Desember 2023



PEMENANG LOMBA HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH TAHUN 2023

Hakim Pengadilan Tinggi Riau an Jon Effreddi, S.H.,M.H. dan Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H. menerima Penghargaan dari Dirjen Badilum sebagai Hakim Tinggi Pengawas Daerah terbaik bedasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1817/DJU/SK.TI2.1.2/XI/2023 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023 diberikan di di Pendopo Wahya Wibawa Graha Pemerintah Kabupaten Jember. tanggal 11 Desember 2023

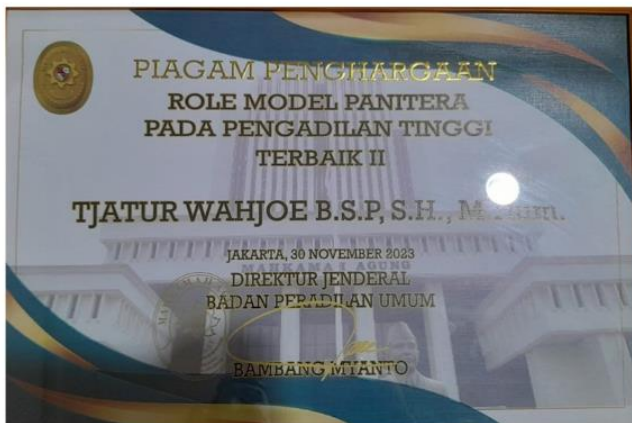


PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2023



PENERIMAAN PENGHARGAAN EVALUASI KINERJA KEUANGAN SEMESTER I PENGADILAN TINGGI RIAU, KATEGORI IKPA TERBAIK DAN PERINGKAT I PENGAJUAN GAJI TERCEPAT DARI KPPN KEMENTERIAN KEUANGAN

Pengadilan Tinggi Riau menerima penghargaan dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Riau atas Prestasi IKPA Terbaik dan Peringkat I Pengajuan Gaji Tercepat



PENERIMAAN PENGHARGAAN ROLE MODEL PANITERA

Panitera Pengadilan Tinggi Riau Bapak Tjatur Wahjo Boewana S. Poetro S.H., M.Hum. menerima Penghargaan dari Dirjen Badilum atas Role Model Panitera Terbaik Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1817/DJU/SK.TI2.1.2/XI/2023 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023 diberikan di Pendopo Wahya Wibawa Graha Pemerintah Kabupaten Jember. tanggal 11 Desember 2023

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM RIAU TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS IA
Peringkat II Pengadilan terbaik dalam kinerja
Layanan E-Court Kategori Peradilan Umum dengan
beban kerja > 2000



PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS IA
Peringkat III Penghargaan Hakim Mediator dengan
tingkat Keberhasilan Terbaik di Pengadilan Negeri
Tahun 2023



PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS IA
Terbaik II Lomba role model Panitera pada
Pengadilan Kelas IA Tahun 2023

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM RIAU TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

Penghargaan Unit Kerja Berpredikat WBK
Tahun 2023



PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II

Peringkat II Lomba Administrasi Perkara
Dan Keuangan Perkara Tahun 2023



PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II

Peringkat Pertama Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun
2023

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM RIAU TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

Peringkat III Pengadiln Terbaik Dalam Kinerja Layanan Gugatan Sederhana Peradilan Umum dengan beban kerja 501 - 1000 Tahun 2023



PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II

Peringkat I Pengadiln terbaik kinerja layanan keterbukaan Informasi Kategori Peradilan Umum dengan beban kerja 1001 - 2000



PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II

Peringkat I Pengadiln terbaik kinerja layanan keterbukaan Informasi Kategori Peradilan Umum dengan beban kerja 1001 - 2000

DAFTAR ISI

PROFIL PIMPINAN.....	5
HAKIM TINGGI.....	6
PROFIL PIMPINAN.....	12
DAFTAR TABEL.....	24
DAFTAR GAMBAR.....	25
BAB I PENDAHULUAN.....	26
A. KEBIJAKAN UMUM.....	27
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	28
BAB II KEADAAN & PENYELESAIAN PERKARA.....	29
A. KEADAAN PERKARA.....	30
1. KEADAAN PERKARA DI TINGKAT PERTAMA.....	30
2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING.....	33
3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI.....	33
4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI.....	34
B. PENYELESAIAN PERKARA.....	34
1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS.....	34
2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU.....	35
3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI, DAN PK...37	37
4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI.....	38
5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI.....	38
C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL.....	39
1. POSBAKUM.....	39
2. SIDANG KELILING/LAYANAN TERPADU.....	40
3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA).....	40
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	41
A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA.....	42
1. SUMBER DAYA MANUSIA DI PENGADILAN TINGGI RIAU.....	42
2. SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI RIAU.....	45
3. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK GOLONGAN.....	47
4. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK PENDIDIKAN.....	47
5. PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA.....	48
B. PROMOSI & MUTASI.....	48
C. PENSIUN.....	50
D. DIKLAT (SDM TEKNIKS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT).....	51
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	52

A.	PENGELOLAAN KEUANGAN.....	53
1.	REALISASI DIPA 01.....	53
2.	REALISASI DIPA 03.....	54
3.	REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP).....	55
B.	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.....	55
1.	TANAH	55
2.	TANAH & GEDUNG.....	56
3.	KENDARAAN DINAS	60
4.	MESIN NON TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK).....	60
5.	MESIN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK).....	61
C.	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	61
1.	IMPLEMENTASI E-COURT	61
2.	IMPLEMENTASI SIPP	62
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	63
A.	PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS.....	64
B.	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	64
C.	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	65
BAB VI	PENGAWASAN.....	67
A.	INTERNAL	68
1.	PENGAWASAN DAERAH	68
2.	PENGAWASAN BIDANG	71
3.	PENANGANAN PENGADUAN	72
4.	EVALUASI	73
BAB VII	PENUTUP	74
A.	KESIMPULAN	75
B.	SARAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Pidana Biasa dan Pidana Khusus Pengadilan Tingkat Pertama.....	30
Tabel 2. Perkara Perdata dan Perdata Khusus Pengadilan Tingkat Pertama	31
Tabel 3. Keadaan Perkara Tingkat Banding	33
Tabel 4. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	33
Tabel 5.Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	34
Tabel 6. Jumlah sisa perkara tingkat banding yang diputus tahun 2023.....	34
Tabel 7. Jumlah sisa perkara Pidana Tingkat Pertama yang diputus tahun 2023	35
Tabel 8. Jumlah sisa perkara Perdata Pengadilan Tingkat Pertama yang diputus tahun 2023....	35
Tabel 9. Jumlah Perkara Tingkat Banding yang diputus tepat waktu	35
Tabel 10. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang diputus tepat waktu	36
Tabel 11. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK.....	37
Tabel 12. Jumlah perkara Perdata yang berhasil di Mediasi	38
Tabel 13. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.....	39
Tabel 14. Posbakum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau	39
Tabel 15. Sidang keliling di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau	40
Tabel 16. Perkara prodeo di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau	40
Tabel 17. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Riau	42
Tabel 18. SDM Pengadilan Negeri sewilayah hukum PT Riau	45
Tabel 19. SDM berdasarkan kelompok Golongan	47
Tabel 20. SDM berdasarkan kelompok Pendidikan PT Riau.....	47
Tabel 21. Penghargaan Satya Lencana	48
Tabel 22. Mutasi masuk PT Riau.....	48
Tabel 23. Mutasi Keluar dari PT Riau	49
Tabel 24. Promosi & Mutasi Pengadilan sewilayah hukum PT Riau	49
Tabel 25. Pensiun di Pengadilan Tinggi Riau	50
Tabel 26. Pensiun Pengadilan Negeri sewilayah hukum PT Riau.....	50
Tabel 27. Jumlah mengikuti diklat teknis dan non teknis	51
Tabel 28. Realisasi Anggaran DIPA 01	53
Tabel 29. Realisasi Anggaran DIPA 03	54
Tabel 30. Realisasi PNBPT Tahun 2023.....	55
Tabel 31. Daftar Tanah	56
Tabel 32. Daftar PSP Tanah & Gedung	56
Tabel 33. Daftar PSP Kendaraan dinas.....	60
Tabel 34. Daftar PSP Mesin Non TIK	60
Tabel 35. Daftar PSP Mesin TIK	61
Tabel 36. Implementasi E-Court Tahun 2023	61
Tabel 37. Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau	64
Tabel 38. Hasil Penilaian Lomba PTSP Dirjen Badilum	65
Tabel 39. Inovasi Pengadilan sewilayah hukum PT Riau	65
Tabel 40. Pengawasan daerah Tahun 2023	69
Tabel 41. Penanganan Pengaduan.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Riau.....	28
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum PT Riau.....	28
Gambar 3. Evaluasi Implementasi SIPP	63



PENGADILAN TINGGI RIAU

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM

Pengadilan Tinggi Riau sebagai salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman adalah Peradilan Tingkat Banding yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain serta selalu melakukan pengawasan kepada Hakim-Hakim dan Pegawai baik di Pengadilan Riau sendiri maupun di Pengadilan Tingkat Pertama pada wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Riau membawahi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Riau, yang meliputi:

1. PN Pekanbaru Kelas IA
2. PN Dumai Kelas IA
3. PN Bangkinang Kelas IB
4. PN Pelalawan Kelas II
5. PN Siak Sri Indrapura Kelas II
6. PN Rengat Kelas II
7. PN Bengkalis Kelas II
8. PN Pasir Pengaraian Kelas II
9. PN Tembilahan Kelas II
10. PN Rokan Hilir Kelas II
11. PN Teluk Kuantan Kelas II

Setiap Lembaga Peradilan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independent, tidak memihak dan kompeten merupakan salah satu komponen utama pencitraan dalam sebuah negara hukum, namun demikian bukan berarti bahwa prinsip-prinsip independensi tersebut dapat mengesampingkan prinsip akuntabilitas maupun transparansi, karenanya warga peradilan haruslah mempunyai pemahaman yang memadai dalam menilai hal tersebut.

Pengadilan Tinggi Riau dan satker di bawahnya tetap berupaya meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, dalam bentuk:

1. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Riau Memperoleh penghargaan kategori terbaik Juara III lomba PTSP dan Pengadilan Negeri Pekanbaru memperoleh penghargaan kategori terbaik Juara Harapan I lomba PTSP dari Dirjen Badan Peradilan Umum Tahun 2023.
2. Penerapan aplikasi *e-Court* yang secara terus menerus melakukan pembaharuan untuk memberikan kemudahan kepada pencari keadilan, adanya fitur *e-filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), *e-summons* (pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik). Melalui aplikasi *E-Court* pendaftar gugatan/permohonan dari seorang advokat saja tanpa harus datang ke pengadilan. Selain itu aplikasi *e-Court* memiliki fitur *E-Litigation* yang merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dimana dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (online) pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan dilakukan

secara elektronik. dalam hal ini sidang masih menerapkan konsep pembuktian langsung di persidangan.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Riau dan beberapa Pengadilan Negeri

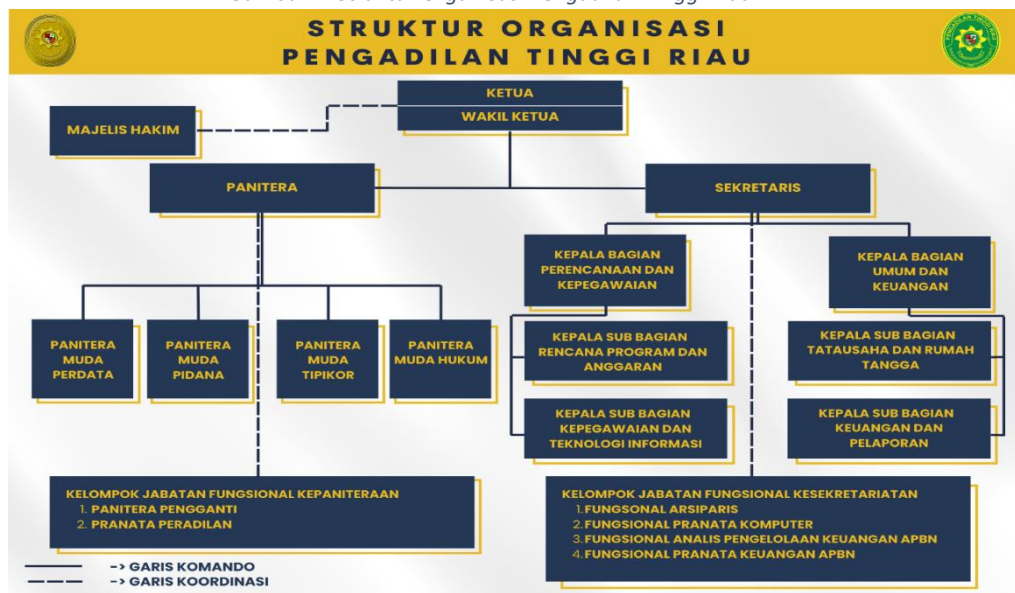
dibawahnya telah mengikuti penilaian Zona Integritas untuk predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan pada Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri Bangkinang memperoleh prediket Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

B. STRUKTUR ORGANISASI

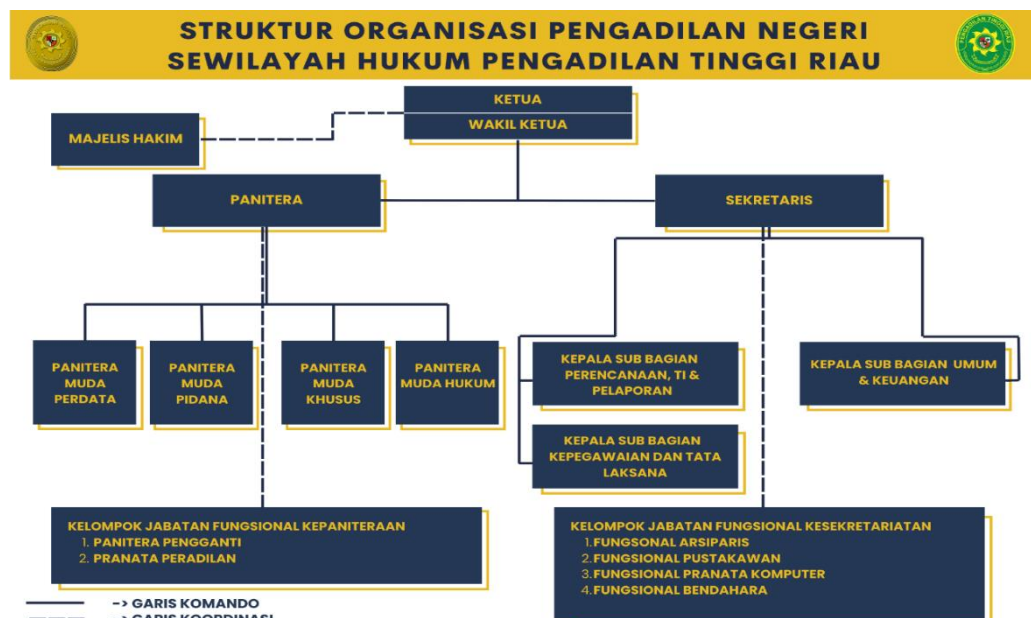
Struktur Organisasi pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukumnya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Riau



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau





BAB II KEADAAN & PENYELESAIAN PERKARA

BAB II

KEADAAN PERKARA DAN PENYELESAIAN PERKARA

Data yang ditampilkan pada laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 merupakan data dari bulan Januari s.d Desember 2023.

A. KEADAAN PERKARA

1. KEADAAN PERKARA DI TINGKAT PERTAMA

Berikut ini rincian keadaan perkara di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023:

Tabel 1. Keadaan Pidana Biasa dan Pidana Khusus Pengadilan Tingkat Pertama

Jenis Perkara	PN Pekanbaru	PN Dumai	PN Bangkinang	PN Bengkalis	PN Rokan Hilir	PN Pelalawan	PN Tembilahan	PN Rengat	PN Pasir Pengaraian	PN Siak Sriindrapura	PN Teluk Kuantan
Pidana Biasa											
a. Sisa Tahun 2022	206	65	103	123	85	46	71	7	37	48	5
b. Masuk	1,407	410	751	864	604	475	342	357	588	436	227
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	357	-	-	-
d. Putus	1,434	428	755	822	623	459	371	324	536	421	184
e. Sisa Tahun 2023	179	47	99	165	67	62	42	70	89	63	48
Pidana Singkat											
a. Sisa Tahun 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Masuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Putus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Sisa Tahun 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pidana Cepat											
a. Sisa Tahun 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Masuk	10	89	250	70	14	110	4	76	157	88	35
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Putus	10	89	250	70	14	110	4	76	157	88	35
e. Sisa Tahun 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelanggaran Lalu Lintas											
a. Sisa Tahun 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Masuk	29,278	3,517	3,157	2,285	5,479	2,549	889	1,615	2,005	1,950	896
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Putus	29,728	3,517	3,157	2,285	5,479	2,549	889	1,615	2,005	1,950	896
e. Sisa Tahun 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pra Peradilan											
a. Sisa Tahun 2022	-	1	-	-	-	3	1	-	-	1	-

b. Masuk	27	8	6	6	6	-	1	1	7	4	2
c. Cabut	2	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-
d. Putus	25	9	6	4	6	-	2	1	7	5	2
e. Sisa Tahun 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pidana Anak											
a. Sisa Tahun 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
b. Masuk	30	17	31	19	17	14	12	16	21	22	12
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Putus	30	16	31	19	17	13	12	4	20	22	11
e. Sisa Tahun 2023	-	1	-	-	-	1	-	2	2	-	1
Tipikor											
a. Sisa Tahun 2022	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Masuk	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Putus	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Sisa Tahun 2023	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perikanan											
a. Sisa Tahun 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Masuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Putus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Sisa Tahun 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2. Perkara Perdata dan Perdata Khusus Pengadilan Tingkat Pertama

Jenis Perkara	PN Pekanbaru	PN Dumai	PN Bangkinang	PN Pelalawan	PN Siak Sri Indrapura	PN Rengat	PN Bengkalis	PN Pasir Pengaraian	PN Rokan Hilir	PN Teluk Kuantan	PN Tembilahan
a. Sisa Tahun 2021	101	13	21	25	22	8	27	16	31	29	2
b. Masuk	327	74	96	41	77	31	53	85	59	37	21
c. Cabut	57	12	7	-	-	4	5	2	14	-	7
d. Putus	272	56	83	52	72	27	60	90	76	51	10
e. Sisa Tahun 2022	99	19	34	14	27	8	15	9	15	66	6
a. Sisa Tahun 2021	13	-	-	-	2	-	6	8	4	-	-
b. Masuk	331	67	34	119	102	43	120	175	52	13	54
c. Cabut	28	11	2	-	-	1	-	1	3	2	9
d. Putus	305	56	33	119	101	42	118	179	53	11	42
e. Sisa Tahun 2022	11	1	1	-	3	-	8	3	2	-	3
a. Sisa Tahun 2021	12	2	-	-	-	-	1	4	-	-	-
b. Masuk	57	-	17	19	5	16	10	14	8	1	15
c. Cabut	17	-	-	-	-	2	-	3	-	-	2
d. Putus	49	2	17	19	5	14	11	13	8	1	13
e. Sisa Tahun 2022	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
a. Sisa Tahun 2021	5	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-

b. Masuk	9	2		1	-	-	4	-	1	-	-
c. Cabut	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-
d. Putus	10	-		-	1	-	2	1	3	-	-
e. Sisa Tahun 2022	3	2		1	-	-	2	-	1	-	-
a. Sisa Tahun 2021	16	-			-	-	-	-	-	-	-
b. Masuk	70	-			-	-	-	-	-	-	-
c. Cabut	7	-			-	-	-	-	-	-	-
d. Putus	64	-			-	-	-	-	-	-	-
e. Sisa Tahun 2022	15	-			-	-	-	-	-	-	-

2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Berikut ini rincian keadaan perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Riau tahun 2023.

Tabel 3. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk	Jumlah Beban	Cabut	Putus 2023	Sisa Tahun 2023	% Putus
Perdata	20	185	206	0	195	11	94,7%
Pidana Biasa	65	706	771	0	706	65	91,6%
Pidana Anak	0	24	24	0	24	0	100%
Tipikor	5	31	36	0	35	1	97,2%
Jumlah	90	946	1037	0	960	77	92%

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Berikut ini rincian keadaan perkara di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023.

Tabel 4. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

No	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Kasasi Di Th. 2023	Jumlah Perkara Kasasi Yang Putus Di Tahun 2023
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Pidana	90	28
		Perdata	62	5
		Pidana Khusus	34	20
		Perdata Khusus	52	24
2	Pengadilan Negeri Bangkinang	Pidana	15	5
		Perdata	14	1
3	Pengadilan Negeri Dumai	Pidana	44	58
		Perdata	10	0
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	Pidana	115	104
		Perdata	7	0
5	Pengadilan Negeri Rengat	Pidana	28	14
		Perdata	3	3
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	Pidana	28	15
		Perdata	9	6
7	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Pidana	13	6
		Perdata	6	6
8	Pengadilan Negeri Tembilahan	Pidana	5	5
		Perdata	1	1
9	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Pidana	33	2
		Perdata	10	7
10	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Pidana	57	38
		Perdata	12	5
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Pidana	20	27
		Perdata	2	0

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

Berikut ini rincian keadaan perkara Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023.

Tabel 5. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

No.	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Di Th. 2023	Jumlah Perkara Peninjauan Kembali (PK) Yang Putus Di Tahun 2023
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Pidana	50	14
		Perdata	16	4
		Pidana Khusus	7	2
		Perdata Khusus	0	0
2	Pengadilan Negeri Dumai	Pidana	24	19
		Perdata	1	2
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	Pidana	29	14
		Perdata	5	2
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	Pidana	27	15
		Perdata	4	2
5	Pengadilan Negeri Rengat	Pidana	17	24
		Perdata	2	1
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	Pidana	23	10
		Perdata	4	2
7	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Pidana	12	2
		Perdata	2	0
8	Pengadilan Negeri Tembilahan	Pidana	11	7
		Perdata	1	0
9	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Pidana	13	0
		Perdata	3	0
10	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Pidana	106	60
		Perdata	0	0
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Pidana	1	0
		Perdata	0	0

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Berikut ini rincian jumlah sisa perkara pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum

Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022 yang diputus Tahun 2023

Tabel 6. Jumlah sisa perkara tingkat banding yang diputus tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa Perkara Th. 2022	Sisa Perkara Th. 2022 Yang Diputus Th. 2023	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara
Perdata	20	20	100%
Pidana Biasa	65	65	100%
Pidana Anak	0	0	0%
Tipikor	5	5	100%
Jumlah	90	90	100%

Tabel 7. Jumlah sisa perkara Pidana Tingkat Pertama yang diputus tahun 2023

No	Satuan Kerja	Pidana			Pidana Khusus		
		Sisa Perkara Th. 2022	Sisa Perkara Th. 2022 yang diselesaikan tahun 2023	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara	Sisa Perkara Th. 2022	Sisa Perkara Th. 2022 yang diselesaikan tahun 2023	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara
1	PN Pekanbaru	206	122	59,2%	-	-	-
2	PN Dumai	65	65	100%	-	-	-
3	PN Bangkinang	103	103	100%	-	-	-
4	PN Pelalawan	46	46	100%	-	-	-
5	PN Siak	49	49	100%	-	-	-
6	PN Rengat	37	37	100%	-	-	-
7	PN Bengkalis	123	123	100%	-	-	-
8	PN Pasir Pengaraian	37	37	100%	1	1	100 %
9	PN Rokan Hilir	108	108	100%	-	-	-
10	PN Tembilahan	71	71	100%	-	-	-
11	PN Teluk Kuantan	5	5	100%	-	-	-
	Jumlah	850	766	90,1%	1	1	100%

Tabel 8. Jumlah sisa perkara Perdata Pengadilan Tingkat Pertama yang diputus tahun 2023

No	Satuan Kerja	Perdata			Perdata Khusus		
		Sisa Perkara Th. 2022	Sisa Perkara Th. 2022 yang diselesaikan tahun 2023	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara	Sisa Perkara Th. 2022	Sisa Perkara Th. 2022 yang diselesaikan tahun 2023	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara
1	PN Pekanbaru	102	102	100%	15	15	100%
2	PN Dumai	21	21	100%	0	0	-
3	PN Bangkinang	35	35	100%	0	0	-
4	PN Pelalawan	13	13	100%	0	0	-
5	PN Siak	30	30	100%	0	0	-
6	PN Rengat	8	8	100%	0	0	-
7	PN Bengkalis	0	0	100%	0	0	-
8	PN Pasir Pengaraian	0	0	100%	0	0	-
9	PN Rokan Hilir	15	15	100%	0	0	-
10	PN Tembilahan	9	9	100%	0	0	-
11	PN Teluk Kuantan	15	15	100%	0	0	-
	Jumlah	248	248	100%	15	15	100%

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Sesuai surat edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, batas penyelesaian perkara yaitu maksimal 3 bulan untuk penyelesaian perkara di pengadilan tingkat banding dan maksimal 5 bulan untuk penyelesaian perkara di

pengadilan tingkat pertama. Berikut ini rincian jumlah perkara di Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023.

Tabel 9. Jumlah Perkara Tingkat Banding yang diputus tepat waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Th. 2023	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Rasio Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu
Pidana Biasa	706	706	0	100%
Pidana Anak	24	24	0	100%
Perdata	195	195	0	100%
Tipikor	35	35	0	100%
Jumlah	960	960	0	100%

Tabel 10. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang diputus tepat waktu

No	Satuan Kerja	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus Th. 2023	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Rasio Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Pidana	1434	1429	5	99,6%
		Perdata	298	217	81	72,8%
		Pidana Khusus	95	92	3	96,8%
		Perdata Khusus	77	77	0	100%
2	Pengadilan Negeri Dumai	Pidana	428	426	2	99,5%
		Perdata	78	68	10	87,2%
		Pidana Khusus	16	16	0	100%
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	Pidana	755	754	1	99,8%
		Perdata	131	94	37	71,7%
		Pidana Khusus	31	31	0	100%
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	Pidana	898	894	4	99,6%
		Perdata	240	225	15	93,8%
		Pidana Khusus	19	19	0	100%
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Pidana	547	547	0	100%
		Perdata	85	85	5	100%
		Pidana Khusus	23	23	0	100%
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	Pidana	459	459	0	100%
		Perdata	58	56	2	96,5%
		Pidana Khusus	13	13	0	100%
7	Pengadilan Negeri Rengat	Pidana	324	324	0	100%
		Perdata	83	83	0	100%
		Pidana Khusus	14	14	0	100%
		Perdata Khusus	2	2	0	100%
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Pidana	700	700	0	100%
		Perdata	231	231	0	100%
		Pidana Khusus	20	20	0	100%
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	Pidana	375	375	0	100%
		Perdata	71	71	2	100%
		Pidana Khusus	12	12	0	100%
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Pidana	514	514	0	100%
		Perdata	217	199	18	91,70%
		Pidana Khusus	22	22	0	100%
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Pidana	232	232	0	100%
		Perdata	28	23	0	82,1%
		Pidana Khusus	11	11	0	-

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI, DAN PK

Berikut ini rincian jumlah perkara di tahun 2023 pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang tidak

mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Tabel 11. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK

No	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Perkara PN Yang Putus Th. 2023 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		Perkara PN Yang Putus Th. 2023 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		Perkara PN Yang Putus Th. 2023 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	
				Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	PN Pekanbaru	Pidana	1.434	1.335	93,09%	1.386	96,65%	1.420	99,00%
		Perdata	298	227	76,17%	236	79,20%	282	94,63%
		Pidana Khusus	95	66	69,47%	75	78,94%	95	100,00%
		Perdata Khusus	77	0	0	52	67,50%	0	0
2	PN Dumai	Pidana	428	364	85,05%	391	91,36%	425	99,30%
		Perdata	78	65	83,33%	78	100,00%	78	100,00%
		Pidana Khusus	16	16	100,00%	16	100,00%	16	100,00%
3	PN Bangkinang	Pidana	755	731	96,82%	740	98,01%	726	96,16%
		Perdata	110	87	79,09%	101	91,82%	105	95,45%
		Pidana Khusus	31	29	93,55%	31	100,00%	31	100,00%
4	PN Bengkalis	Pidana	898	730	81,30%	783	87,20%	894	99,60%
		Perdata	240	230	95,80%	233	97,10%	240	100,00%
		Pidana Khusus	19	16	84,20%	18	94,70%	19	100,00%
5	PN Rengat	Pidana	324	262	80,90%	295	91,00%	307	94,80%
		Perdata	23	19	82,60%	23	100,00%	23	100,00%
		Pidana Khusus	14	12	85,00%	14	100,00%	13	82,90%
		Perdata Khusus	2	2	100,00%	1	50,00%	2	100,00%
6	PN Pasir Pangaraian	Pidana	536	481	89,70%	525	98,00%	524	97,80%
		Perdata	59	53	89,83%	54	91,50%	57	96,60%
		Pidana Khusus	20	17	85,00%	18	90,00%	20	100,00%
7	PN Tembilahan	Pidana	371	342	92,20%	366	98,70%	368	99,20%
		Perdata	12	9	75,00%	11	91,70%	12	100,00%
		Pidana Khusus	12	12	100,00%	12	100,00%	12	100,00%
8	PN Pelalawan	Pidana	459	400	87,14%	431	93,89%	436	94,98%
		Perdata	56	42	75,00%	47	83,92%	52	92,85%
		Pidana Khusus	14	13	92,90%	13	92,90%	0	0,00%
9	PN Siak Sri Indrapura	Pidana	426	355	83,30%	324	76,10%	312	73,20%
		Perdata	217	204	94,00%	194	89,40%	193	88,90%

		Pidana Khusus	22	17	77,30%	15	68,10%	14	63,70%
10	PN Rokan Hilir	Pidana	547	507	92,70%	490	89,60%	441	80,60%
		Perdata	85	71	83,50%	76	89,40%	85	100,00%
		Pidana Khusus	23	7	30,40%	2	8,70%	0	0%
11	PN Teluk Kuantan	Pidana	184	149	81,00%	171	92,93%	184	100,00%
		Perdata	28	23	82,14%	27	96,42%	28	100,00%
		Pidana Khusus	11	11	100,00%	11	100,00%	11	100,00%

4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI

Mediasi di pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan

penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Berikut ini jumlah perkara perdata tahun 2023 pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang berhasil mediasi.

Tabel 12. Jumlah perkara Perdata yang berhasil di Mediasi

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi Th. 2023	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	195	14	175	4	13
2	Pengadilan Negeri Dumai	37	3	32	1	1
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	75	5	59	7	4
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	33	2	30	1	0
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	38	2	33	0	3
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	35	2	32	0	1
7	Pengadilan Negeri Rengat	7	1	6	0	0
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	18	2	14	1	1
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	10	0	8	0	2
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	34	2	30	2	0
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	17	1	16	0	0
Jumlah		499	34	435	16	25

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak ("UU SPPA"). Berikut ini jumlah perkara pidana anak Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang berhasil melakukan diversifikasi.

Tabel 13. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Pidana Anak Th. 2023	Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diversi Th. 2023	Status Keberhasilan Diversi			Dalam Proses
				Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	30	6	4	2	0	0
2	Pengadilan Negeri Dumai	17	2	1	1	0	0
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	31	0	5	0	0	0
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	19	1	0	1	0	0
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	23	2	1	0	0	0
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	13	0	0	0	0	0
7	Pengadilan Negeri Rengat	16	3	1	1	0	1
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	21	2	0	1	0	1
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	12	4	1	3	0	0
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	22	3	2	1	0	0
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	12	3	2	1	0	0
Jumlah		216	26	17	11	0	2

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

1. POSBAKUM

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan

advice hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Berikut data alokasi dan realisasi anggaran Posbakum pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun pada tahun 2023.

Tabel 14. Posbakum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau

No	Satuan Kerja	Jumlah Anggaran Posbakum (Rp.)	Realisasi Anggaran Posbakum		Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Posbakum (orang)
			(Rp.)	(%)	
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Rp 38.400.000	Rp 38.400.000	100%	200
2	Pengadilan Negeri Dumai	Rp 31.200.000	Rp 31.200.000	100%	121
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	Rp 31.200.000	Rp 31.200.000	100%	576
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	Rp 31.200.000	Rp 31.200.000	100%	72
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Rp 49.800.000	Rp 49.800.000	100%	129
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	100%	180
7	Pengadilan Negeri Rengat	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	100%	0
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	100%	144
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	100%	46
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	100%	313
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	100%	26
Jumlah		Rp325.800.000	Rp 325.800.000	100%	1807

2. SIDANG KELILING/LAYANAN TERPADU

Masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu

menangani kendala tersebut digalakkan program Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan. Berikut data layanan sidang di luar gedung Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023

Tabel 15. Sidang keliling di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau

No	Satuan Kerja	Jumlah Zitting Plaatz	Lokasi Sidang Zitting Plaatz	Jumlah Perkara Diselesaikan Di Zitting Plaatz Th. 2023
1	Pengadilan Negeri Bengkalis	2	Duri, Mandau	0
			Selatpanjang, Kab Kepulauan Meranti	182

3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014, fasilitas Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses

berperkara di pengadilan. Berikut data Prodeo pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023.

Tabel 16. Perkara prodeo di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau

No.	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Prodeo Diselesaikan Th. 2023	Jumlah Anggaran Prodeo (Rp.)	Realisasi Anggaran Prodeo	
				(Rp.)	(%)
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	4	Rp4.690.000	Rp3.261.000	69,54%
2	Pengadilan Negeri Dumai	0	0	0	-
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	0	0	0	-
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	0	0	0	-
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	0	0	0	-
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	0	0	0	-
7	Pengadilan Negeri Rengat	0	0	0	-
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	0	0	0	-
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	0	0	0	-
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	0	0	0	-
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	0	0	0	-
	Jumlah	4	Rp 4.690.000	Rp 3.261.000	69,54%



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia pada beberapa pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2023 mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun pengisian formasi jabatan setelah adanya mutasi dan promosi, namun masih ada Pengadilan Negeri yang mengalami

kekosongan pada beberapa formasi jabatan dan kekurangan sumber daya manusia khususnya tenaga staf atau pelaksana. Berikut ini rincian sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023

1. SUMBER DAYA MANUSIA DI PENGADILAN TINGGI RIAU

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023 sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang Hakim, 3(tiga) orang

Hakim Adhoc, 58 (lima puluh delapan) ASN dan 7 (tujuh) orang tenaga honorer/PPNPN. Rincian sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Riau dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 17. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Riau

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.	Ketua	Jumlah Hakim Tinggi 23 Orang
2	Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua	
3	NELSON SAMOSIR, S.H., M.H	Hakim Tinggi	
4	PETRIYANTI, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
5	DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum	Hakim Tinggi	
6	INANG KASMAWATI, S.H.	Hakim Tinggi	
7	ASWIJON, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
8	ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
9	H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
10	NOER ALI, S.H.	Hakim Tinggi	
11	SETIA RINA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
12	Hj. DAHMIWIRDA D., S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
13	RAMSES PASARIBU, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
14	MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
15	YUS ENIDAR, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
16	Y WISNU WICAKSONO, S.H.	Hakim Tinggi	
17	YUZAIDA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
18	JON EFFREDDI, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
19	ADMIRAL, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
20	Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
21	SRI ENDANG AMPERAWATI NINGSIH, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
22	LILIN HERLINA, S.H., M.H	Hakim Tinggi	
23	Dr. H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
24	TANTOWI JAUHARI, S.H., M.H.	Hakim Adhoc Tipikor	Jumlah Hakim Adhoc 3 Orang
25	Dr. H. BUSRIZALTI, S.H., M.H.	Hakim Adhoc Tipikor	
26	HENDRI, S.H., M.H.	Hakim Adhoc Tipikor	
27	TJATUR WAHJOE B.S.P., S.H., M.Hum.	Panitera	Jumlah Pejabat Struktural 12 Orang
28	T. YUDIANTO SYAFEI NARIM, S.IP., S.H., M.M	Sekretaris	

29	JUNI DWIANTI, S.Si., M.H.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	
30	ROBY HIDAYAT, S.T.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	
31	I.A.N. RATNAYANI, S.H., M.H.	Panmud. Perdata	
32	M. JAMALIS, S.H.	Panitera Muda Pidana	
33	DIYAH FAJAR SARI, S.H., M.H	Panitera Muda Tipikor	
34	YUSNIDAR, S.H.	Panmud Hukum	
35	DERSIMA HARAHAP, S.E.	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	
36	ROMA TUA JUWYTA SIHOMBING, S.E.	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	
37	MUHADI, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	
38	MANASE SIAHAAN, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	
39	YUNITA BANGUN, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti Sebanyak 23 Orang
40	NASIB SAGALA, S.H.	Panitera Pengganti	
41	DES SURYA, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
42	HASAN BASRI, S.H., M.H	Panitera Pengganti	
43	SUYATNO, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
44	EFRIZAL, S.H.	Panitera Pengganti	
45	JONATHAN SINAGA, S.H	Panitera Pengganti	
46	JUSLAK ARTHUR LANIFANIK BALUKH, S.H.	Panitera Pengganti	
47	TETI ANGGRAINI, S.H	Panitera Pengganti	
48	HERMINA SILABAN, S.H.	Panitera Pengganti	
49	AMIRIN, S.H.	Panitera Pengganti	
50	MF. EVA JUNIAR SIMAMORA, S.H.	Panitera Pengganti	
51	HJ. ROSVIATI, S.H.	Panitera Pengganti	
52	SUNARIYAH, S.H.	Panitera Pengganti	
53	SINTA HERAWATI, S.H.	Panitera Pengganti	
54	PARINGATAN SARAGIH, S.H.	Panitera Pengganti	
55	AZWIR, S.H.	Panitera Pengganti	
56	INDAH MUHARANI, S.T.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Jumlah Fungsional Tertentu 8 orang
57	SESILIYA RAHAYU, S.E.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	
58	EKA CHITRA MURVIRIANTI, S.E.	Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan / Mahir	
59	BETHARIA OKTAVIANI, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	
60	FADHLIAMIN, S.SI	Pranata Komputer Ahli Pertama	
61	ANGGI HAULANI ADHA, S.E., M.M.J	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	
62	MELGISAPUTRA DWI NANDA, S.Kom., M.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	
63	ASYURA TRI RAHMADHANI, A.Md.A.B.	Arsiparis Pelaksana	
64	MELLA ROSARIA INDAH, S.H., M.H	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	Jumlah Tenaga non Teknis 19 orang
65	JUSNIWATI	Klerek-Pengadministrasi Perkantoran	
66	DARWIS M., S.Kom	Operator-Penata Layanan	
67	ANDI ANUGRA, S.H	Operasional Klerek-Penata Keprotokolan	
68	ISRA FILONA, S.H.	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	
69	ROMMY SAPUTRA, S.E.	Operator-Penata Layanan Operasional	
70	INTAN MAHDALENA, S.Sos	Operator-Penata Layanan	

71	NOVALIA SIMAMORA, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan	
72	KAMALUDDIN	Klerek-Pengadministrasi Perkantoran	
73	PERMAIZAL	Klerek-Pengadministrasi Perkantoran	
74	KATARINA HUTAPEA, S.Si.	Operator-Penata Layanan Operasional	
75	YUDI OKTAVIANUS, S.E.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	
76	AMALIA KHOIRUNNISA, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan	
77	FAJRUL AMNI, A.Md.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi Klerek-Pengadministrasi Perkantoran Prasarana	
78	ADETIA PRATAMA, A.Md	Operator - Teknisi Sarana dan Prasaranan	
79	ARINI PUSPASARI, A.Md.	Klerek - Pengelola Layanan Pengadaan	
80	TUSIRAN	Pengemudi	
81	FELIN STEFANI LUMBANTOBING, A.Md.	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	
82	YESICA WINDAYANA MALAU, A.Md	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	
83	HENDRA SETIAWAN, S.Ap.	Arsiparis Pertama	Jumlah Tenaga PPPK 2 orang
84	YUDHI DARMAWAN, S.E.	Perencana Ahli Pertama	
85	SAMIDI	PPNPN	Jumlah Tenaga PPNPN 7 orang
86	HADI SUTianto	PPNPN	
87	SYAMBUDI	PPNPN	
88	M. SYAHRIR	PPNPN	
89	RODAL NGALAMIN	PPNPN	
90	NUROKHIM	PPNPN	
91	MUDORI	PPNPN	

2. SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI RIAU

Rincian jumlah Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 18. SDM Pengadilan Negeri sewilayah hukum PT Riau

No	Jabatan	PN Pekanbaru	PN Dumai	PN Bangkinang	PN Bengkalis	PN Rokan Hilir	PN Pelalawan	PN Rengat	PN Pasir Pengaraian	PN Tembilahan	PN Siak Sri Indrapura	PN Teluk Kuantan
1	Ketua	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Wakil Ketua	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1
3	Hakim	11	7	8	8	5	8	5	6	5	5	6
4	Hakil Adhoc Tipikor	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Hakim Adhoc PHI	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Hakim Adhoc Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panitera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Panmud Pidana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Panmud Perdata	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
11	Panmud Hukum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Panmud Tipikor	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Panmud PHI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Panmud Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Panitera Pengganti	14	4	4	1	2	1	0	0	1	1	2
16	Jurusita/Jurusita Pengganti	10	4	3	2	1	2	1	4	1	2	1
17	Sekretaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	KA. Sub. Bag PTIP	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Ka. Sub. Bag Umum Dan Keuangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Ka. Sub. Bag Kepegawaian Dan Ortala	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1

21	Tenaga Non Teknis	12	9	11	7	0	8	7	7	7	8	5
22	PPPK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Tenaga Honorer	17	13	9	11	9	12	7	8	12	7	11
	Jumlah Personil	84	45	44	38	27	40	25	34	34	33	35
	Jumlah Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc	101										
	Jumlah Non Hakim	338										

3. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK GOLONGAN

Jumlah Hakim dan Pegawai Pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023

sebanyak 403 Orang, Berikut rincian Jumlah hakim dan pegawai berdasarkan kelompok Golongan.

Tabel 19. SDM berdasarkan kelompok Golongan

No	Satuan Kerja	Golongan IV (orang)	Golongan III (orang)	Golongan II (orang)	Golongan I (orang)
1	Pengadilan Tinggi Riau	35	38	6	0
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	18	34	6	0
3	Pengadilan Negeri Dumai	9	18	4	0
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	6	25	4	0
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	2	20	5	0
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	3	18	4	0
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	2	25	1	0
8	Pengadilan Negeri Rengat	3	17	3	0
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	2	18	6	0
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	2	15	5	0
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	2	21	3	0
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	3	16	4	0
Jumlah		87	265	51	0

4. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK PENDIDIKAN

Berikut rincian Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan

Tinggi Riau Tahun 2023 berdasarkan kelompok Pendidikan Tahun 2023.

Tabel 20. SDM berdasarkan kelompok Pendidikan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau

No	Satuan Kerja	Tingkat Pendidikan						
		S3	S2	S1	DIII	DII	DI	SMA
1	Pengadilan Tinggi Riau	3	32	39	6	0	0	3
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	1	22	35	5	0	0	3
3	Pengadilan Negeri Dumai	1	5	18	5	0	0	2
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	0	10	19	4	0	0	2
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	0	5	16	5	0	0	1
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	0	4	17	3	0	0	1
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	0	10	16	1	0	0	1
8	Pengadilan Negeri Rengat	0	4	14	4	0	0	4
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	0	5	15	4	0	0	2
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	0	2	13	4	0	0	3
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	0	5	17	3	0	0	1
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	0	5	13	4	0	0	1
Jumlah		5	109	232	48	0	0	24

5. PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung Telah memberikan tanda penghargaan kepada Hakim dan pegawai Mahkamah Agung yang telah berbakti selama 8 tahun, 16 Tahun, 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun lebih secara terusan meneruskan dengan

menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian. Berikut rincian jumlah penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023.

Tabel 21. Penghargaan Satya Lencana

NO	SATUAN KERJA	PENGHARGAAN				
		SATYA LENCANA KARYA SATYA XXX (ORANG)	SATYA LENCANA KARYA SATYA XX (ORANG)	SATYA LENCANA KARYA SATYA X (ORANG)	KARYA SATYA SEWINDU (ORANG)	KARYA SATYA DWI WINDU (ORANG)
1	Pengadilan Tinggi Riau	8	0	1	3	0
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	3	6	0	2	3
3	Pengadilan Negeri Dumai	1	2	1	3	1
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	1	0	0	1	3
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	0	1	0	2	0
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	0	1	0	0	0
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	0	0	2	1	0
8	Pengadilan Negeri Rengat	2	1	1	2	1
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	0	2	0	1	0
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	1	0	0	3	0
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	0	0	0	0	0
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	0	2	0	0	0
Jumlah		16	15	5	18	8

B. PROMOSI & MUTASI

Berikut rincian promosi dan mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023.

Tabel 22. Mutasi masuk PT Riau

No.	Nama	Jabatan	Keterangan (Mutasi Dari)
1	Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.	Ketua	Pengadilan Tinggi Kupang
2	Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua	Pengadilan Tinggi Kendari
3	PETRIYANTI, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pengadilan Tinggi Padang
4	INANG KASMAWATI, S.H.	Hakim Tinggi	Pengadilan Tinggi Padang
5	NOER ALI, S.H.	Hakim Tinggi	Pengadilan Tinggi Gorontalo
6	RAMSES PASARIBU, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pengadilan Tinggi Jambi
7	MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pengadilan Tinggi Palangkaraya
8	Y WISNU WICAKSONO, S.H.	Hakim Tinggi	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
9	JUSLAK ARTHUR LANIFANIK BALUKH, S.H.	Panitera Pengganti	Pengadilan Tinggi Mataram

10	ANGGI HAULANI ADHA, S.E., M.M.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Pengadilan Agama Pekanbaru
11	INTAN MAHDALENA, S.Sos	Operator-Penata Layanan Operasional	Pengadilan Negeri Bangkinang
12	NOVALIA SIMAMORA, S.H.	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	Pengadilan Negeri Bangkinang
13	ARINI PUSPASARI, A.Md.	Klerek - Pengelola Layanan Pengadaan	Pengadilan Negeri Bangkinang
14	ASYURA TRI RAHMADHANI, A.Md.A.B.	Arsiparis Pelaksana	Pengadilan Negeri Bengkalis
15	YESICA WINDAYANA MALAU, A.Md.	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	Pengadilan Negeri Rengat
16	HENDRA SETIAWAN, S.Ap.	Arsiparis Pertama	PPPK
17	YUDHI DARMAWAN, S.E.	Perencana Ahli Pertama	PPPK

Tabel 23. Mutasi Keluar dari PT Riau

No.	Nama	Jabatan	Keterangan (Mutasi Keluar ke)
1	Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pengadilan Tinggi Bandung
2	BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pengadilan Tinggi Medan
3	KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum	Hakim Tinggi	Pengadilan Tinggi Jakarta
4	IMAN GULTOM, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pengadilan Tinggi Bandung
5	ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pengadilan Tinggi Banten
6	LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pengadilan Tinggi Medan
7	ALIAMAN, S.H.	Panitera Pengganti	Pengadilan Tinggi Medan
8	FARIDA ISTIQOMAH, A.Md	Pelaksana/Terampil-Arsiparis	Pengadilan Tinggi Jakarta
9	TRİYANTI DYAH PERTIWI, A.Md.	Pelaksana/Terampil-Pranata Komputer	Pengadilan Negeri Purworejo

Tabel 24. Promosi & Mutasi Pengadilan sewilayah hukum PT Riau

No	Satuan Kerja	Jabatan	Jumlah Promosi / Mutasi Masuk (Orang)	Jumlah Promosi / Mutasi Keluar (Orang)
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Hakim Karir	3	3
		Hakim Adhoc	1	0
		Struktural (Non Hakim)	1	1
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	0	0
2	Pengadilan Negeri Dumai	Hakim Karir	1	2
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	2	1
		Fungsional	2	1
		Pelaksana	0	0
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	Hakim Karir	0	3
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	2	3
		Fungsional	2	1
		Pelaksana	1	3
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	Hakim Karir	0	0
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	2	2
		Fungsional	0	2
		Pelaksana	0	0
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Hakim Karir	1	1

		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	2	1
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	1	0
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	Hakim Karir	1	2
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	1	0
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	0	1
7	Pengadilan Negeri Rengat	Hakim Karir	0	1
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	0	0
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	0	1
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Hakim Karir	0	2
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	0	0
		Fungsional	0	1
		Pelaksana	0	0
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	Hakim Karir	0	1
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	1	1
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	0	0
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Hakim Karir	1	0
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	2	2
		Fungsional	0	0
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Hakim Karir	0	0
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	1	0
		Fungsional	2	0
		Pelaksana	0	0

C. PENSIUN

Berikut rincian pensiun Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri sewilayah hukum pada Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023.

Tabel 25. Pensiun di Pengadilan Tinggi Riau

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.	Ketua	Meninggal Dunia
2.	SYAFWAN ZUBIR, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	Pensiun Normal
3.	UKURKEN GINTING, S.H.	Panitera Pengganti	Pensiun Normal
4.	AMRI WAHAB, S.H.	Panitera Pengganti	Pensiun Normal
5.	RUSTAM, S.H.	Panitera Pengganti	Pensiun Normal
6.	SANTOSO, S.H.	Panitera Pengganti	Pensiun Normal
7.	USMAN, S.H.	Panitera Pengganti	Pensiun Normal

Tabel 26. Pensiun Pengadilan Negeri sewilayah hukum PT Riau

No	Satuan Kerja	Jumlah Hakim dan Pegawai Yang Pensiun di Tahun 2023
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	1
2	Pengadilan Negeri Dumai	1
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	0
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	2
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	0

6	Pengadilan Negeri Pelalawan	0
7	Pengadilan Negeri Rengat	0
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	0
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	0
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	0
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	0
Jumlah		4

D. DIKLAT (SDM TEKNIKS/NON TEKNIKS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia teknis peradilan dilakukan dengan mengacu kepada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode untuk mewujudkan tenaga teknis dan non teknis peradilan yang profesional, berintegritas dan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi ini

diarahkan untuk meningkatnya kualitas penyelenggaraan, peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap badan peradilan.

Berikut rincian jumlah hakim dan pegawai yang mengikuti diklat teknis dan diklat menpin pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023.

Tabel 27. Jumlah mengikuti diklat teknis dan non teknis

No.	Satuan Kerja	Jumlah Hakim dan Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis	Jumlah Hakim dan Pegawai Yang Mengikuti Diklat Non Teknis
1	Pengadilan Tinggi Riau	23	34
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	12	6
3	Pengadilan Negeri Dumai	2	0
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	9	5
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	7	0
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	2	2
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	6	4
8	Pengadilan Negeri Rengat	8	8
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	4	7
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	8	1
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	6	8
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	3	1
Jumlah		90	76



BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Realisasi anggaran dan pengelolaan PNBP Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi

Riau Tahun 2023 dijelaskan pada tabel dibawah ini.

1. REALISASI DIPA 01

Tabel 28. Realisasi Anggaran DIPA 01

No	Satuan Kerja	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
				Rp.	%	Rp.	%
1	Pengadilan Tinggi Riau	Belanja Pegawai	Rp 21.286.214.000	Rp 21.266.753.432	99,91%	Rp 19.460.568	0,09%
		Belanja Barang	Rp 4.522.275.000	Rp 4.521.985.776	99,99%	Rp 289.224	0,01%
		Belanja Modal	Rp 177.812.000	Rp 177.779.700	99,98%	Rp 32.300	0,02%
		Total	Rp 25.986.301.000	Rp 25.966.518.908	99,92%	Rp 19.782.092	0,08%
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Belanja Pegawai	Rp 9.913.429.000	Rp 9.796.318.386	91,0%	Rp 117.110.614	1,2%
		Belanja Barang	Rp 2.383.148.000	Rp 2.354.216.871	89,1%	Rp 28.931.129	1,2%
		Belanja Modal	Rp 749.000.000	Rp 748.006.000	99,9%	Rp 994.000	0,1%
		Total	Rp 13.045.577.000	Rp 12.898.541.257	98,9%	Rp 147.035.743	1,13%
3	Pengadilan Negeri Dumai	Belanja Pegawai	Rp 5.262.410.000	Rp 5.253.990.597	99,8%	Rp 8.419.403	0,2%
		Belanja Barang	Rp 1.958.979.000	Rp 1.955.231.444	99,8%	Rp 3.747.556	0,2%
		Belanja Modal	Rp 631.681.000	Rp 630.545.900	99,8%	Rp 1.135.100	0,20%
		Total	Rp 7.853.070.000	Rp 7.839.767.941	99,8%	Rp 13.302.059	0,2%
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	Belanja Pegawai	Rp 5.725.863.000	Rp 5.651.248.966	98,70%	Rp 74.614.034	1,3%
		Belanja Barang	Rp 1.320.538.000	Rp 1.320.123.282	99,97%	Rp 414.718	0,0%
		Belanja Modal	Rp 427.181.000	Rp 426.978.000	99,95%	Rp 203.000	0,1%
		Total	Rp 7.473.582.000	Rp 7.398.350.248	98,99%	Rp 75.231.752	1,0%
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	Belanja Pegawai	Rp 3.684.435.000	Rp 3.636.700.315	98,7	Rp 47.734.685	1,3%
		Belanja Barang	Rp 1.763.928.000	Rp 1.761.821.868	99,88	Rp 2.106.132	0,1%
		Belanja Modal	Rp 117.611.000	Rp 117.540.000	99,94	Rp 71.000	0,06%
		Total	Rp 5.565.974.000	Rp 5.516.062.183	99,10	Rp 49.911.817	0,9%
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Belanja Pegawai	Rp 3.128.068.000	Rp 3.125.492.804	99,92%	Rp 2.575.196	0,08%
		Belanja Barang	Rp 1.491.500.000	Rp 1.490.768.291	99,95%	Rp 731.709	0,05%
		Belanja Modal	Rp 200.000.000	Rp 197.125.000	98,56%	Rp 2.875.000	1,44%
		Total	Rp 4.819.568.000	Rp 4.813.386.095	99,87%	Rp 6.181.905	0,13%
7		Belanja Pegawai	Rp 4.247.332.000	Rp 4.206.539.748	99,04%	Rp 40.792.252	0,96%

	Pengadilan Negeri Pelalawan	Belanja Barang	Rp 1.769.079.000	Rp 1.767.070.928	99,89%	Rp 2.008.072	0,11%
		Belanja Modal	Rp -	Rp -	0%	Rp -	0%
		Total	Rp 6.016.411.000	Rp 5.973.610.676	99,29%	Rp 42.800.324	1,07%
8	Pengadilan Negeri Rengat	Belanja Pegawai	Rp 2.841.147.000	Rp 2.801.323.128	99,7%	Rp 8.250.872	0,3%
		Belanja Barang	Rp 1.512.681.000	Rp 1.485.783.959	98,2%	Rp 26.897.041	1,8%
		Belanja Modal	Rp 10.000.000	Rp 9.950.000	99,5%	Rp 50.000	0,5%
		Total	Rp 4.372.720.000	Rp 4.335.830.087	99,2%	Rp 36.889.913	0,8%
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Belanja Pegawai	Rp 3.542.612.000	Rp 3.428.791.581	96,8%	Rp 113.820.419	3,2%
		Belanja Barang	Rp 1.355.025.000	Rp 1.353.370.622	99,9%	Rp 1.654.378	0,12%
		Belanja Modal	Rp 50.240.000	Rp 50.240.000	100%	Rp -	0%
		Total	Rp 4.947.877.000	Rp 4.832.402.203	97,7%	Rp 115.474.797	2,3%
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	Belanja Pegawai	Rp 2.769.643.000	Rp 2.725.527.748	98,4%	Rp 44.115.252	98,4%
		Belanja Barang	Rp 1.505.933.000	Rp 1.505.899.372	100,00%	Rp 33.628	100,0%
		Belanja Modal	Rp -	Rp -	0%	Rp -	0,40%
		Total	Rp 4.275.576.000	Rp 4.231.427.120	99,0%	Rp 44.148.880	99,0%
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Belanja Pegawai	Rp 2.772.103.000	Rp 2.744.243.461	99%	Rp 27.859.539	1,0%
		Belanja Barang	Rp 1.341.813.000	Rp 1.339.410.446	99,8%	Rp 2.402.554	0,18%
		Belanja Modal	Rp -	Rp -	0%	Rp -	0%
		Total	Rp 4.113.916.000	Rp 4.083.653.907	99,3%	Rp 30.262.093	0,7%
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Belanja Pegawai	Rp 2.863.340.000	Rp 2.823.218.666	98,60%	Rp 40.121.334	1,4%
		Belanja Barang	Rp 1.572.250.000	Rp 1.571.666.152	99,96%	Rp 583.848	0,04%
		Belanja Modal	Rp -	Rp -	0%	Rp -	0%
		Total	Rp 4.435.590.000	Rp 4.394.884.818	99,08%	Rp 40.705.182	0,92%
Total			Rp 92.906.162.000	Rp 92.283.665.086	99,32%	Rp 622.496.914	0,68%

2. REALISASI DIPA 03

Tabel 29. Realisasi Anggaran DIPA 03

No	Satuan Kerja	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Sisa Anggaran	%
1	Pengadilan Tinggi Riau	Belanja Barang	Rp 235.514.000	Rp 235.503.651	100,00%	Rp 10.349	0,00%
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Belanja Barang	Rp 519.470.000	Rp 514.919.500	99,1%	Rp 4.550.500	0,90%
3	Pengadilan Negeri Dumai	Belanja Barang	Rp 223.800.000	Rp 223.710.530	99,96%	Rp 89.470	0,04%
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	Belanja Barang	Rp 184.700.000	Rp 184.476.250	99,88%	Rp 223.750	0,12%
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	Belanja Barang	Rp 542.580.000	Rp 542.452.176	99,98%	Rp 127.824	0,01%
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Belanja Barang	Rp 198.300.000	Rp 198.294.000	100,0%	Rp 6.000	0,00%
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	Belanja Barang	Rp 159.258.000	Rp 154.262.100	96,86%	Rp 4.995.900	3,1%
8	Pengadilan Negeri Rengat	Belanja Barang	Rp 137.100.000	Rp 136.713.015	99,7%	Rp 386.985	0,3%
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Belanja Barang	Rp 88.500.000	Rp 87.605.200	99,0%	Rp 894.800	1,0%

10	Pengadilan Negeri Tembilahan	Belanja Barang	Rp 152.900.000	Rp 152.762.740	99,9%	Rp 137.260	0,1%
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Belanja Barang	Rp 126.750.000	Rp 126.687.105	99,95%	Rp 62.895	0,05%
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Belanja Barang	Rp 205.500.000	Rp 205.300.250	99,90%	Rp 199.750	0,1%
Total			Rp 2.774.372.000	Rp 2.752.098.517	99,20%	Rp 22.273.483	0,80%

3. REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Berikut rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi

Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023.

Tabel 30. Realisasi PNBP Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Kode Akun					
		425131	425232	425233	425239	425911	425122
1	Pengadilan Tinggi Riau	Rp 29.981.689	Rp -	Rp -	Rp 4.420.000	Rp -	Rp -
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Rp 22.456.202	Rp -	Rp 17.920.000	Rp 84.809.500	Rp -	Rp -
3	Pengadilan Negeri Dumai	Rp 11.167.806	Rp 1.650.000	Rp 6.655.000	Rp 16.921.500	Rp -	Rp -
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	Rp -	Rp 3.380.000	Rp 11.350.000	Rp 42.586.600	Rp -	Rp -
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	Rp 53.469.458	Rp 720.000	Rp 9.770.000	Rp 32.711.500	Rp -	Rp 1.567.899
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Rp 36.058.110	Rp 11.390.000	Rp 5.520.000	Rp 166.951.000	Rp 185.000	Rp -
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	Rp 20.957.280	Rp 2.420.000	Rp 7.920.000	Rp 22.546.500	Rp -	Rp -
8	Pengadilan Negeri Rengat	Rp 25.723.168	Rp -	Rp 980.000	Rp 3.220.000	Rp 15.127.500	Rp -
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Rp 26.187.086	Rp -	Rp -	Rp 7.625.000	Rp 21.657.000	Rp -
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	Rp 10.302.646	Rp 910.000	Rp 2.575.000	Rp 17.304.340	Rp 4.849.284	Rp -
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Rp 14.232.200	Rp 924.000	Rp 10.213.000	Rp 15.092.500	Rp -	Rp -
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Rp 1.796.400	Rp 670.000	Rp 1.890.000	Rp 12.377.000		Rp -
Jumlah		Rp 252.332.045	Rp 22.064.000	Rp 74.793.000	Rp 426.565.440	Rp 41.818.784	Rp 1.567.899

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2023 meliputi tanah dan

bangunan, Kendaraan Dinas, mesin non TIK, mesin non TIK, Mesin TIK dan Prasarana Lainnya.

1. TANAH

Dalam upaya terus mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib pengelolaan dan penatausahaan BMN. Pengadilan Tinggi Maupun Pengadilan Negeri terus melakukan inventarisasi legalitas Kepemilikan seluruh BMN. Khususnya sertifikat tanah. Hal ini disebabkan kompleksitas masalah tanah

yang menurut ketentuan peraturan perundang – rundangan harus berstatus milik pemerintah Republik Indonesia. Berikut rincian progres pelaksanaan sertifikasi tanah selama tahun 2023 pada Pengadilan sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau.

Tabel 31. Daftar Tanah

No	Satuan Kerja	Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat	Total
1	Pengadilan Tinggi Riau	5	1	6
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	9	0	9
3	Pengadilan Negeri Dumai	2	0	2
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	4	0	4
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	10	0	10
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	2	0	2
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	2	0	2
8	Pengadilan Negeri Rengat	9	0	9
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	3	0	3
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	7	0	7
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	4	0	4
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	2	0	2

2. TANAH & GEDUNG

Penetapan Status Penggunaan BMN adalah suatu bentuk surat keputusan dari Pengelola Barang ataupun Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang sesuai ketentuan pendelegasian sebagian kewenangan untuk menetapkan kewenangan penggunaan BMN yang berada dan menjadi tanggung jawab Satuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN merupakan administrasi yang

melekat pada materiil BMN itu sendiri sehingga harus dimiliki oleh setiap BMN yang sesuai ketentuan untuk menghindari duplikasi, kehilangan arsip data serta terjaminnya kepastian hukum BMN itu sendiri. Berikut rincian tanah dan gedung Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang telah sudah/belum PSP tahun 2023.

Tabel 32. Daftar PSP Tanah & Gedung

No	SaTuan Kerja	Nama Aset	Sudah PSP		Belum PSP	
			Luas (m2)	Nilai (Rp)	Luas (m2)	Nilai (Rp)
1	Pengadilan Tinggi Riau	Tanah	11.795	55.600.370.000	10.000	40.000.000
		Bangunan	7.543	12.909.493.423		
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.932	9.700.327.000		
		Tanah Banguann Kantor Pemerintah	9.939	18.096.921.800		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	681	4.636.941.000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	890	2,926,406,000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	195	314.105.000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	557	991,506,000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.336	2,035,229,000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	299	2,035,229,000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	665 m	930,318,000		
		3	Pengadilan Negeri Dumai	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.000	3.177.624.000
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.370			4.022.190.000	0	
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8.279	5.651.597.000		

		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah I	600	402.780.000		
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah I	597	400.766.000	970	Rp2.198.154.000
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah II	3.000	1.689.000.000	770	Rp1.625.616.000
5	Pengadilan Negeri Bengkulu	Tanah Kantor Utama	4.490	7.426.460.000		
		Tanah Zitting Plaatz SLP	766	1.250.457.000		
		Tanah Zitting Plaatz Duri	1.037	1.021.445.000		
		Tanah Rumah Negara	6.589	9.450.778.000		
		Bangunan Kantor UTAMA	940	1.359.000.000		
		Bangunan Tanah Rumah Negara	1.518	1.725.224.595		
		Bangunan Zitting Plaatz SLP	150	278.878.000		
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	731	107.450.000		
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	15.820	39.733.600		
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.538	5.024.856.000		
		Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	173	246.986.000		
		Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	120	272.950.000		
		Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	120	272.950.000		
		Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	222.580.000		
		Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	222.580.000		
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70	222.580.000		
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70	222.580.000		
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70	222.580.000		
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70	222.580.000		
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70	222.580.000		
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	5000	Rp 1,018,625,000		
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9650	Rp 2,764,725,000		
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	1538	Rp 3.950.357.502		
		Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	43	Rp 70.891.096		
		Bangunan Pos Jaga Permanen	16	Rp 18.595.768		
		Bangunan Pos Jaga Permanen	16	Rp 18.595.768		
		Bangunan Halte/Shelter	80	Rp 98.841.440		
		Bangunan Lainnya	15	Rp 18.532.488		
		Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	120	Rp 186.103.976		
		Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	120	Rp 186.103.976		
		Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	Rp 265.906.664		
		Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	Rp 265.906.664		

		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70	Rp 108.561.024		
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70	Rp 108.561.024		
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70	Rp 108.561.024		
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70	Rp 108.561.024		
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70	Rp 108.561.024		
8	Pengadilan Negeri Rengat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.832	Rp 6.118.213.000		
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.948	Rp 5.521.399.000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	460	Rp 909.681.000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1093	Rp 350.088.000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	400	Rp 127.800.000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1686	Rp 554.348.000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1445	Rp 261.904.000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	805	Rp 370.125.000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3405	Rp 7.770.789.000		
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	500			
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	900	Rp 3.038.160.023		
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	216	Rp 1.167.574.279		
		Bangunan Gudang Tertutup Permanen	36	Rp 75.879.324		
		Rumah Negara Golongan I Type C Permanen	70	Rp 136.131.427		
		Rumah Negara Golongan I Type C Permanen	70	Rp 69.305.177		
		Rumah Negara Golongan I Type C Permanen	70	Rp 109.196.526		
		Rumah Negara Golongan I Type D Permanen	54	Rp 125.178.956		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 73.950.205		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 73.950.205		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 73.950.205		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 73.950.205		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 73.950.205		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 103.352.094		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 112.471.812		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 120.442.123		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 122.471.812		

		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 130.066.698		
		Rumah Negara Golongan II Type D Permanen	54	Rp 48.739.908		
		Rumah Negara Golongan II Type D Permanen	54	Rp 58.772.452		
		Rumah Negara Golongan II Type D Permanen	54	Rp 47.854.080		
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Bangunan Gedung Kantor utama	900	Rp 13.118.851.866	9.879 M2	Rp 1,710,870,000
		Tanah kantor utama	20.000	Rp 7.135.840.000		
		Bangunan Gedung Arsip	424	Rp 1.828.393.189		
		Tanah Gedung Arsip	2840	Rp 1.051.169.000	1	Rp 198,937,000
		Tanah Mess	9879	Rp 1.710.870.000		
		Musholla kantor utama	70	Rp 230.000.000		
		Musholla Gedung Arsip	114	Rp 185.023.502		
		Pos Jaga	9	Rp 23.000.000		
		Rumah Negara Golongan I Tipe B (Ketua)	120	Rp 241.081.522		
		Rumah Negara Golongan I Tipe C (Wakil Ketua)	70	Rp 116.212.000		
		Rumah Negara Golongan I Tipe C	70	Rp 126.231.238		
		Rumah Negara Golongan I Tipe C (Kopel)	140	Rp 237.796.047		
		Rumah Negara Golongan I Tipe C (Kopel)	140	Rp 235.006.264		
		Rumah Negara Golongan I Tipe C (Kopel)	140	Rp 233.914.123		
		Rumah Negara Golongan I Tipe C (Kopel)	140	Rp 238.631.425		
		Rumah Negara Golongan I Tipe C	70	Rp 100.081.710		
		Rumah Negara Golongan I Tipe C	70	Rp 104.487.427		
		10	Pengadilan Negeri Tembilahan	Tanah Bangunan Rumah Negara	575	Rp 987,735,000
Tanah Bangunan Rumah Negara	600			Rp 514,190,000		
Tanah Bangunan Rumah Negara	620			Rp 531,330,000		
Tanah Bangunan Rumah Negara	2.100			Rp 1,801,309,000		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.000			Rp 3,512,000,000		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	798			Rp 686,035,000		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	792			Rp 126,875,200		
Bangunan Gedung Kantor Permanen	599			Rp 2,253,294,605		
Bangunan Gedung Kantor Permanen	70			Rp 36,303,300		
Bangunan Gedung Kantor Permanen	70			Rp 38,577,600		
Bangunan Gedung Kantor Permanen	70			Rp 38,261,250		
Pagar Permanen	180			Rp 208,724,256		

11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9364 m ²	Rp337.102.262		
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9352 m ²	Rp336.670.264		
		Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1172 m ²	Rp726.347.000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	6762 m ²	Rp270.479.714		
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	10.001	Rp 958,576,000		
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10.000	Rp 1,930,370,000		

3. KENDARAAN DINAS

Berikut rincian jumlah penetapan status penggunaan (PSP) kendaraan Dinas pada Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan

Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang telah sudah/belum PSP tahun 2023

Tabel 33. Daftar PSP Kendaraan dinas

No	Satuan Kerja	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)	Jumlah Sudah PSP	Jumlah Belum PSP
1	Pengadilan Tinggi Riau	Kendaraan Roda 4	5	5	-
		Kendaraan Roda 2	7	7	-
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Kendaraan Roda 4	6	6	0
		Kendaraan Roda 2	14	13	1
3	Pengadilan Negeri Dumai	Kendaraan Roda 4	2	2	-
		Kendaraan Roda 2	8	8	-
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	Kendaraan Roda 4	3	3	-
		Kendaraan Roda 2	8	8	-
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	Kendaraan Roda 4	2	2	-
		Kendaraan Roda 2	10	10	-
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Kendaraan Roda 4	5	4	1
		Kendaraan Roda 2	5	5	-
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	Kendaraan Roda 4	2	2	-
		Kendaraan Roda 2	5	5	-
8	Pengadilan Negeri Rengat	Kendaraan Roda 4	3	3	-
		Kendaraan Roda 2	8	8	-
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Kendaraan Roda 4	2	2	-
		Kendaraan Roda 2	9	9	-
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	Kendaraan Roda 4	3	3	-
		Kendaraan Roda 2	5	5	-
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Kendaraan Roda 4	3	2	1
		Kendaraan Roda 2	17	11	6
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Kendaraan Roda 4	1	1	-
		Kendaraan Roda 2	3	3	-

4. MESIN NON TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Berikut rincian jumlah penetapan status penggunaan (PSP) Mesin Non TIK pada

pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023.

Tabel 34. Daftar PSP Mesin Non TIK

No	Satuan Kerja	Jumlah (unit)	Jumlah Sudah PSP	Jumlah Belum PSP
1	Pengadilan Tinggi Riau	971	898	73
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	1.375	1352	23
3	Pengadilan Negeri Dumai	551	354	197

4	Pengadilan Negeri Bangkinang	654	585	69
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	431	417	14
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	413	362	51
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	915	885	30
8	Pengadilan Negeri Rengat	29.462	29.462	0
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	774	730	44
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	541	394	147
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	656	634	22
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	464	463	1

5. MESIN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Berikut rincian jumlah penetapan status Pengadilan Negeri sewilayah hukum penggunaan (PSP) Mesin TIK pada Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023.

Tabel 35. Daftar PSP Mesin TIK

No	Satuan Kerja	Jumlah (unit)	Jumlah Sudah PSP	Jumlah Belum PSP
1	Pengadilan Tinggi Riau	194	183	11
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	289	279	10
3	Pengadilan Negeri Dumai	142	69	73
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	150	144	6
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	104	100	4
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	105	96	9
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	96	77	19
8	Pengadilan Negeri Rengat	1.848	1.848	0
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	141	85	56
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	146	103	43
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	163	148	15
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	55	52	3

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. IMPLEMENTASI E-COURT

Ecourt adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Pada tahun 2023, Pengadilan

Tinggi Riau dan 15 (lima belas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau seluruhnya telah menerapkan E-Court. Rincian jumlah perkara pada Pengadilan negeri yang didaftarkan melalui ecourt, dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 36. Implementasi E-Court Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Pendaftaran (Dibayar)	Berhasil Nomor Perkara	Perkara Gugatan	Perkara Gugatan Sederhana	Perkara Bantahan	Pemo honan
1	Pengadilan Tinggi Riau	61	61	61	-	-	-
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	701	688	317	59	13	312
3	Pengadilan Negeri Dumai	152	152	70	3	2	77
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	202	196	124	17	7	48
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	232	232	62	7	1	162

6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	104	104	55	3	0	46
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	185	185	75	9	0	101
8	Pengadilan Negeri Rengat	80	80	21	18	0	41
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	229	229	60	9	1	159
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	70	70	12	3	0	55
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	220	212	65	3	0	142
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	53	52	27	8	1	16

2. IMPLEMENTASI SIPP

Seluruh Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau telah mengimplementasikan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi 5.4.0

Penilaian implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau pada Tahun 2023 dijelaskan pada Gambar dibawah ini.

Gambar 3. Implementasi EIS Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023

#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	501-1000	II	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	146.24	546.51	101.99	186.56	★★★★★ 981.30
2	501-1000	IA	Pengadilan Negeri Dumai	153.98	538.45	120.84	166.45	★★★★★ 979.72
3	1-500	II	Pengadilan Negeri Tembilahan	146.81	543.56	102.00	187.35	★★★★★ 979.72
4	501-1000	II	Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri	144.46	548.46	102.00	184.67	★★★★★ 979.59
5	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	147.09	543.47	101.97	186.23	★★★★★ 978.76
6	1001-2000	II	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	147.21	542.98	101.98	186.39	★★★★★ 978.56
7	>2000	IA	Pengadilan Negeri Pekanbaru	150.13	539.14	120.89	168.40	★★★★★ 978.56
8	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Pelalawan	147.31	545.46	93.94	185.46	★★★★★ 972.17
9	1001-2000	IB	Pengadilan Negeri Bengkalis	143.56	540.50	101.97	185.79	★★★★★ 971.82
10	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Bangkinang	146.79	541.63	101.91	180.34	★★★★★ 970.67
11	1-500	II	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	138.50	538.28	102.00	182.37	★★★★★ 961.15



BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pengadilan Tinggi Riau merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik para pencari keadilan, telah menerapkan amanat Undang-Undang No.25 tahun 2009 mengenai Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dilakukan secara terus menerus pada masing-masing

area perubahan

Terdapat 2 komponen dalam penilaian pelaksanaan pembangunan zona integritas yaitu Komponen Pengungkit dan komponen hasil. Adapun 6 Area Pembangunan Zona Integritas antarlain:

- 1) Area 1 : Manajemen Perubahan
- 2) Area 2 : Penataan Tatalaksana
- 3) Area 3 : Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur
- 4) Area 4 : Penguatan Akuntabilitas
- 5) Area 5 : Penguatan Pengawasan
- 6) Area 6 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 37. Rekapitulasi Penghargaan Predikat WBK/WBBM

No	Satuan Kerja	Jenis Predikat (WBK / WBBM)	Tahun Penerimaan Predikat WBK/WBBM	Keterangan
1	Pengadilan Tinggi Riau	WBK	2023	
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	WBK	2018	
3	Pengadilan Negeri Dumai	-	-	
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	WBK	2023	
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	-	-	
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	-	-	
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	-	-	
8	Pengadilan Negeri Rengat	-	-	
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	-	-	
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	-	-	
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	-	-	
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	-	-	

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Seluruh satker sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai SK Dirjen Badilum No.77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 beserta perubahannya

No.3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Riau

dan beberapa satker dibawahnya memperoleh penghargaan dalam kategori terbaik terfavorit dalam penilaian lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum. Hasil penilaian tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1817/DJU/SK.TI2.1.2/XI/2023 Tentang Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini.
Penetapan Pemenang Lomba Bagi Satuan

Tabel 38. Hasil Penilaian Lomba PTSP Dirjen Badilum

No	Satuan Kerja	Peringkat	Kategori
1	Pengadilan Tinggi Riau	Juara III	PTSP Pengadilan Tingkat Banding
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Juara Harapan I	PTSP Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Untuk mewujudkan Kinerja Peradilan yang Prima, Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri secara berkesinambungan terus melakukan pembenahan dan inovasi terhadap segala jenis layanan baik dari segi teknologi

informasi dan sarana prasarana yang nantinya akan menunjang kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan di lingkungan Peradilan. Berikut inovasi pelayanan publik yang ada di pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.

Tabel 39. Inovasi Pengadilan sewilayah hukum PT Riau

No	Nama Satker	Jumlah Inovasi	Inovasi
1	Pengadilan Tinggi Riau	6	Smart PTSP, EVAKIP, e-Performance, Tuanku Online, SIKAD dan Sinergi
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	15	Aplikasi Antrian Panggilan Sidang, Aplikasi QR-Code Putusan, Aplikasi e-Monev dan Pelaporan Akreditasi Penjaminan Mutu, Aplikasi Antrian Pengunjung PTSP Aplikasi Kasir, Aplikasi Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SIMLAPEG), Aplikasi DUK PN Pekanbaru, Aplikasi Audio Peringatan Anti Gratifikasi, QR-Code Layanan PTSP Aplikasi Penilaian Personal, Aplikasi Survei Disabilitas, Aplikasi Permintaan Alat Tulis Kantor (APATUK), Aplikasi Salinan putusan Online, Aplikasi Eksekusi Online, "SIGADIS TAMILUSIA (Siap Siaga Disabilitas, Wanita Hamil / Menyusu dan Lanjut Usia)"
3	Pengadilan Negeri Dumai	6	Reminder SIPP, Antrian Sidang, Si Jelas Adil, Alakum, Antrian Prioritas Online, Brosur Braile
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	15	Aplikasi Simayang, Aplikasi Antrian PTSP Secara Elektronik, Aplikasi Mext SIPP (Monitoring Eksternal SIPP), VIRAL (Virtual Layanan Asisten PN Bangkinang), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Aplikasi Antrian Persidangan, E-Brosur, TV Media, Center, PTSP Online dan POSBAKUM Online, Kom_NATRA, Personalitas, Superdata, Lampu, Maratun, Aplikasi Strong ZI, Si Pelaku PKP
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	6	Virtual PTSP, PAJERO (Petugas Antar Jemput Roro), PESO (Pesan Layanan Otomatis), Digitalisasi Layanan Informasi Kaum Disabilitas, E – Brosur, PN Bengkalis Info
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	2	Ojek Si-Anjas (Siap Antar Ke Jalan Lintas), Aplikasi Info Perkara dan denda tilang online
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	7	ALADIN (Aplikasi Layanan Informasi Pengadilan), LAYANG BONO (Layanan Pengadilan Negeri Pelalawan Berbasis Online), ESAKU (Elektronik Surat Keterangan), Aplikasi Audio Pemanggilan Persidangan, E-Brosur, Antrian PTSP, Buku Braile Layanan PTSP
8	Pengadilan Negeri Rengat	9	Pojok Disabilitas, Video Running Text, Silanpandu, E-PTSP, E-Forizator, E-Form, Visian -Sarat, Digitalisasi informasi layanan pengadilan, Optimalisasi akses informasi hak-

			hak perempuan yang berhadapan dengan hukum pada pengadilan negeri rangat
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	2	PTSP Online, Seputaran
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	1	SI-KA
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	2	OPASUS (Online Pengambilan Salinan Putusan), E-ISTANA
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	2	E-POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum secara Elektronik), APLIKASI POS-TER



BAB VI PENGAWASAN

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Dalam melaksanakan pengawasan Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung yaitu Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Riau adalah pengawasan melekat dimana serangkaian kegiatan yang

bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau meliputi Pengawasan Daerah pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau, Pengawasan Pembinaan Bidang-bidang pada Pengadilan Tinggi Riau, dan menindaklanjuti pengaduan

1. PENGAWASAN DAERAH

Untuk melaksanakan pengawasan pada Pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau, Ketua Pengadilan Tinggi Riau mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: W4-U/4987/KP.04.5/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

Tugas Hakim Tinggi Pengawas Daerah adalah:

1. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam pemeriksaan perkara dan hasil evaluasi pengawasan tahun sebelumnya baik teknis maupun administrasi peradilan, untuk mengecek tindaklanjutnya.
2. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam penelitian dan pemeriksaan dokumen laporan daerah pembinaan dan pengawasan.
3. Menganalisa temuan-temuan

dimaksud dan menyampaikan laporan Pengadilan Tinggi Riau sekali beserta konsep rencana tindak lanjut pembinaan dan pengawasan

Adapun hasil pengawasan daerah pada tahun 2023 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya administrasi dan penyelenggaraan peradilan baik bidang teknis maupun kesekretariatan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
2. Kendala yang masih dihadapi adalah kurangnya pegawai pada setiap satuan kerja sehingga ada beberapa formasi jabatan yang masih kosong.
3. Kendala lain adalah kondisi sarana dan prasarana yang masih banyak perlu pembaruan dan pengadaan

Rincian Pengawasan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dijelaskan pada dibawah ini

Tabel 40. Pengawasan daerah Tahun 2023

No	Nama Kegiatan Pengawasan	Subjek Pengawasan	Objek Yang Diawasi	Waktu	Tempat	Kesimpulan
1	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Pelalawan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	9 Maret 2023 s/d 10 Maret 2023	PN Pelalawan	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
2	Pembinaan, Pengawasan dan Surveilans	PN Rokan Hilir	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	13 April 2023	PN Rokan Hilir	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
3	Pembinaan, Pengawasan dan Surveilans	PN Dumai	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	8 Mei 2023 s/d 9 Mei 2023	PN Dumai	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
4	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Bangkinang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	9 Mei 2023 s/d 10 Mei 2023	PN Bangkinang	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
5	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Teluk Kuantan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	10 Mei 2023 s/d 12 Mei 2023	PN Teluk Kuantan	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
6	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Pelalawan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	15 Mei 2023 s/d 16 Mei 2023	PN Pelalawan	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
7	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Siak Sri Indrapura	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	22 Mei 2023 s/d 23 Mei 2023	PN Siak Sri Indrapura	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
8	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Pasir Pangaraian	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	24 Mei 2023 s/d 26 Mei 2023	PN Pasir Pangaraian	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
9	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Rokan Hilir	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	24 Mei 2023 s/d 26 Mei 2023	PN Rokan Hilir	Temuan Pemeriksaan sebelumnya sudah ditindak lanjuti, namun ada temuan - temuan baru terkait tupoksi yang perlu diperbaiki
10	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Tembilahan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	28 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023	PN Tembilahan	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
11	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Rokan Hilir	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	29 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023	PN Rokan Hilir	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan

12	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Rengat	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	5 Juni 2023 s/d 7 Juni 2023	PN Rengat	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
13	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Bengkalis	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	11 Juni 2023 s/d 14 Juni 2023	PN Bengkalis	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
14	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Pekanbaru	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	19 Juni 2023 s/d 20 Juni 2023	PN Pekanbaru	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
15	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans secara daring	PN Teluk Kuantan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	21 Juni 2023 s/d 23 Juni 2023	PN Teluk Kuantan	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
16	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans secara daring	PN Bangkinang	PN Ranai	19 Oktober 2023 s/d 20 Oktober 2023	PN Bangkinang	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
17	Pembinaan Pengawasan, Surveilans dan Pendampingan ZI	PN Pelalawan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	19 Oktober 2023 s/d 20 Oktober 2023	PN Pelalawan	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
18	Pembinaan Pengawasan, Surveilans dan Pendampingan ZI	PN Pekanbaru	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	19 Oktober 2023 s/d 20 Oktober 2023	PN Pekanbaru	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
19	Pembinaan Pengawasan, Surveilans dan Pendampingan ZI	PN Rokan Hilir	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	23 Oktober 2023 s/d 25 Oktober 2023	PN Rokan Hilir	Temuan Pemeriksaan sebelumnya sudah difindak lanjuti, namun ada temuan - temuan baru terkait tupoksi yang perlu diperbaiki
20	Pembinaan Pengawasan, Surveilans dan Pendampingan ZI	PN Dumai	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	23 Oktober 2023 s/d 25 Oktober 2023	PN Dumai	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
21	Pembinaan Pengawasan, Surveilans dan Pendampingan ZI	PN Bengkalis	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	23 Oktober 2023 s/d 25 Oktober 2023	PN Bengkalis	Temuan Pemeriksaan sebelumnya sudah difindak lanjuti, namun ada temuan - temuan baru terkait tupoksi yang perlu diperbaiki
22	Pembinaan Pengawasan, Surveilans dan Pendampingan ZI	PN Siak Sri Indrapura	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	26 Oktober 2023 s/d 27 Oktober 2023	PN Siak Sri Indrapura	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
23	Pembinaan Pengawasan, Surveilans dan	PN Pekanbaru	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	16 November 2023	PN Pekanbaru	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan

	Pendampingan ZI					(minor) yang perlu diperbaiki
24	Pembinaan Pengawasan, Surveil dan Pendampingan ZI	PN Bangkinang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	20 November 2023 s/d 21 November 2023	PN Bangkinang	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
25	Pembinaan Pengawasan, Surveil dan Pendampingan ZI	PN Pelalawan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	21 November 2023	PN Pelalawan	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
26	Pembinaan Pengawasan, Surveil dan Pendampingan ZI	PN Rengat	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	22 November 2023 s/d 24 November 2023	PN Rengat	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
27	Pembinaan Pengawasan, Surveil dan Pendampingan ZI	PN Tembilahan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	22 November 2023 s/d 24 November 2023	PN Tembilahan	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
28	Pembinaan Pengawasan, Surveil dan Pendampingan ZI	PN Dumai	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	28 November 2023 s/d 30 November 2023	PN Dumai	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
29	Pembinaan Pengawasan, Surveil dan Pendampingan ZI	PN Rokan Hilir	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	28 November 2023 s/d 30 November 2023	PN Rokan Hilir	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
30	Pembinaan Pengawasan, Surveil dan Pendampingan ZI	PN Teluk Kuantan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	12 Desember 2023	PN Teluk Kuantan	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
31	Pembinaan Pengawasan, Surveil dan Pendampingan ZI	PN Siak Sri Indrapura	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	14 Desember 2023	PN Siak Sri Indrapura	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki

2. PENGAWASAN BIDANG

Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Riau mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: W4.U/5176/KP.04.5/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang

1. Bidang Teknis

- Memantau pelaksanaan teknis administratif penyelesaian perkara banding, di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau
- Memantau & memeriksa

Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas/Pembinaan bidang-bidang Pengadilan Tinggi Riau. Adapun Tugas Hakim Tinggi Pengawas Bidang adalah:

- pelaksanaan administrasi dan prosedur penerimaan perkara banding
- Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi register perkara

- banding
- Memantau dan memeriksa pelaksanaan prosedur jalannya berkas perkara banding
 - Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi laporan perkara banding
 - Memantau & memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara banding
 - Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara
 - Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Riau dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya.

2. Bidang Kesekretariatan

- Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap disiplin dan kinerja Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat lainnya.

Adapun hasil pengawasan bidang pada Pengadilan Tinggi Riau tahun 2023 secara umum sebagai berikut:

- Pola Bindalmin telah berjalan sesuai ketentuan dalam buku Pola Bindalmin, namun masih terdapat

kurang ketelitian dalam melaksanakan tugas.

- Penerapan hukum acara dalam putusan PT Riau secara substansi sudah baik.
- Dalam bidang administrasi persidangan telah berjalan dan terlaksana dengan baik
- Pelaksanaan teknis persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
- Penyusunan surat-surat yang terdapat pada Bundel B dan dalam berkas perkara tingkat banding secara umum telah terlaksana dengan baik.
- Penyelesaian minutası berkas-berkas perkara banding, baik di Bagian Kepaniteraan Pidana, Perdata maupun di Kepaniteraan Hukum telah berjalan baik.
- Pengawasan disiplin Hakim dan pegawai pada Pengadilan Tinggi Riau sudah baik, namun perlu ditingkatkan kinerja yang lebih baik dan professional.
- Pembukuan Keuangan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya sudah sesuai peraturan
- Sistem administrasi perlengkapan BMN menggunakan aplikasi SIMAK BMN sudah berjalan dengan baik
- Tata kelola administrasi kepegawaian telah berjalan baik
- Pengelolaan dan administrasi surat menyurat sudah rapi
- Pengembangan Teknologi & Informasi pada Pengadilan Tinggi Riau sudah berjalan baik

3. PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Riau Pada Tahun 2023 sebanyak 18 (lima belas) pengaduan dan sudah

ditindaklanjuti dengan penanganan pengaduan tersebut dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 41. Penanganan Pengaduan

Sisa Tahun 2022	Jumlah Pengaduan Masuk 2023	Jumlah Pengaduan Ditangani	Jumlah Pengaduan Selesai Ditangani	Jumlah Sisa Pengaduan Waktu Berjalan
3	18	21	17	4

4. EVALUASI

Pada tahun 2023 dilakukan evaluasi atas Hasil Pengawasan terhadap bidang-bidang di Pengadilan Tinggi Riau maupun 11 (sebelas) satker di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan briefing setiap bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri di bawahnya.
2. Membuat kontrak kinerja. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa satker tersebut sudah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan /kontrak kinerja pada tahun sebelumnya. Terhadap satker yang belum melakukan tindaklanjut sesuai dengan kesepakatan kontrak kinerja akan diberikan sanksi dan dipantau secara intensif
3. Pada tahun 2023, evaluasi

pelayanan peradilan juga dilakukan melalui:

- a. Survei Kepuasan Masyarakat secara elektronik untuk melihat respon terhadap pelayanan publik. Hasil survei kepuasan pelanggan sejumlah 39 responden terhadap 9 (sembilan) ruang lingkup layanan Pengadilan Tinggi Riau dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 98.15 dengan mutu pelayanan SANGAT BAIK.
- b. Survey Presepsi Anti Korupsi secara elektronik untuk melihat hasil survei masyarakat terhadap Presepsi Korupsi di Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2023, hasil Indeks Presepsi Korupsi terhadap 42 responden sebesar 3.91 dengan mutu presepsi BERSIH DARI KORUPSI.



BAB VII PENUTUP

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Selama tahun 2023 Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri dibawahnya tetap berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan memberikan pelayanan publik dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Riau terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik.
4. Seluruh pengadilan di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau sudah menerapkan Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.
5. Pengadilan Negeri diseluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau sudah menerapkan aplikasi e-Court dengan fitur *e-filling* (pendaftaran perkara secara elektronik), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), sehingga pendaftar gugatan/permohonan dari seorang

advokat ataupun pengguna terdaftar dapat melakukan pendaftaran di mana saja, kapan saja tanpa harus datang ke pengadilan. Selain itu Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau juga telah menerapkan *e-e-court* (proses persidangan secara elektronik) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pengadilan Negeri diseluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau saat ini berusaha untuk mengimplementasikan Aplikasi e-BERPADU untuk memudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum, kerja sama antar aparat penegak hukum dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan publik dan/atau pendukung pelayanan publik.

Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, pada tahun 2023 pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau masih mengalami kendala antara lain:

1. Sumber daya manusia, khususnya staf yang ahli dibidang teknologi informasi masih kurang.
2. Sarana dan prasarana gedung dan fasilitas perkantoran masih kurang.
3. Gedung kantor yang tidak layak seperti Pengadilan Negeri Tembilahan, dan beberapa Pengadilan negeri belum punya gedung kantor sendiri seperti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
4. Fasilitas rumah dinas Hakim kurang, dan banyak rumah dinas yang tidak terpelihara karena tidak tersedia anggaran rehab rumah dinas.
5. Penggunaan aplikasi e-BERPADU masih belum maksimal dikarenakan masih dalam tahap transisi dari manual ke
6. digital dan masih terdapat

pengembangan pada aplikasi tersebut.

B. SARAN

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau maka diperlukan:

- a. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan
- b. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, pembangunan gedung kantor dan rumah dinas

